

**POTENSI DAN PELUANG PENERIMAAN DAERAH NTT UNTUK MENDORONG
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Amalia Cotensa Loda¹, Kabrini Mulya Mutiara², Maria Anastasia Ue³, Stefania Luru Esan⁴,
Theresia Yuniarti Panderot⁵, Yustina Agrifa Jelita⁶, Emiliana Martututi Lawalu⁷, Adelheid
Elisabet Loda⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: anastasiaue6@gmail.com

Abstrak: Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki beragam potensi sumber daya alam, terutama di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, potensi tersebut belum tergarap secara optimal sehingga menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan melemahkan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penerimaan daerah, menganalisis peluang peningkatan PAD, mengkaji kendala dalam optimalisasi penerimaan, serta merumuskan strategi pemanfaatan potensi daerah guna mendukung pembangunan Berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi di beberapa kabupaten/kota di NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sektor-sektor strategis seperti pariwisata dan pertanian memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD, pengelolaannya masih menghadapi kendala dalam aspek infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem tata kelola fiskal. Strategi yang disarankan meliputi penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi digital untuk administrasi pajak, peningkatan investasi infrastruktur, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi penerimaan daerah di NTT dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mandiri.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Potensi Ekonomi Daerah, Pembangunan Berkelanjutan, Kemandirian Fiskal, Nusa Tenggara Timur.

Abstract: East Nusa Tenggara Province (NTT) possesses a wide range of natural resource potentials, particularly in the tourism, agriculture, fisheries, and renewable energy sectors, which can be utilized to increase Regional Original Revenue (PAD). However, these potentials have not been optimally developed, resulting in a high dependence on central government transfer funds and weakening the region's fiscal independence. This study aims to identify potential local revenue sources, analyze opportunities to increase PAD, examine the obstacles in optimizing revenue, and formulate strategies for utilizing regional potentials to support sustainable development. A qualitative descriptive approach was used, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis in several districts/cities in NTT. The results show that although strategic sectors such as tourism and agriculture significantly contribute to PAD, their management still faces challenges in infrastructure, human resource capacity, and fiscal governance systems. Recommended strategies include

strengthening regulations, utilizing digital technology for tax administration, improving infrastructure investment, and fostering collaboration between the government, private sector, and local communities. With proper management, regional revenue potential in NTT can significantly contribute to inclusive, sustainable, and independent economic development.

Keywords: *Regional Original Revenue, Regional Economic Potential, Sustainable Development, Fiscal Independence, East Nusa Tenggara.*

PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, serta kekayaan budaya yang khas. Dengan letak geografis yang strategis di kawasan timur Indonesia, NTT memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi daerah secara mandiri. Namun, hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah masih menghadapi sejumlah kendala signifikan, terutama dalam hal pemanfaatan potensi lokal secara optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini menyebabkan NTT masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan, sehingga menghambat kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan potensi ekonomi daerah masih belum maksimal dan belum terintegrasi dengan baik dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), meskipun daerah ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan. Studi oleh JAKADARA (2021) menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih tergolong rendah, dan belum mampu menggantikan dominasi dana transfer dari pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana diuraikan dalam Jurnal JIE (2022). Ketergantungan terhadap dana transfer ini menandakan bahwa NTT belum sepenuhnya mandiri secara fiskal. Seperti dijelaskan dalam Prosiding Sembadha (2022), kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan lokal sangat terbatas akibat lemahnya kapasitas fiskal, termasuk dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi. Dalam kerangka teori desentralisasi fiskal, hal ini menunjukkan

belum efektifnya pelimpahan kewenangan fiskal dari pusat ke daerah (Musgrave & Oates, 1959).

Permasalahan ini juga diperparah oleh lemahnya sistem administrasi perpajakan, kurangnya tenaga ahli, serta infrastruktur teknologi informasi yang masih belum memadai. Penelitian oleh Jurnal Ekonomika INDEPENDEN (2023) menggarisbawahi bahwa proses pemungutan pajak masih dilakukan secara manual dan tidak transparan, membuka ruang kebocoran penerimaan daerah. Sektor-sektor ekonomi potensial seperti pariwisata berbasis alam, peternakan, dan hasil laut masih belum dikembangkan secara maksimal. Jurnal Pariwisata Nusantara (2021) menyebutkan bahwa sektor pariwisata belum didukung oleh infrastruktur dan promosi yang memadai, sementara Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian (2022) menekankan bahwa sektor pertanian dan kelautan belum dikelola secara berkelanjutan. Padahal, pendekatan pembangunan berkelanjutan sangat penting dalam memperkuat kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PAD, seperti dianalisis oleh Jurnal Ekonomi Pembangunan Widya Mandira (2023).

Lebih lanjut, Jurnal Infrastruktur dan Pembangunan Daerah (2022) mencatat bahwa investasi infrastruktur yang lemah menjadi penghambat utama pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Hal ini diperkuat oleh hasil kajian Jurnal Ekonomi-Qu (2022), yang menyatakan bahwa pembangunan daerah belum selaras dengan penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Masalah lain yang cukup mendasar adalah kurangnya sinergi antara perencanaan pembangunan dan kebijakan fiskal. Seperti dijelaskan dalam Jurnal Pembangunan Daerah JIK (2023), banyak program pembangunan belum diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dalam konteks teori pembangunan berkelanjutan (Brundtland Report, 1987), pembangunan seharusnya memperhitungkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam tinjauan oleh Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan (2022) dan Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah (2023), juga ditemukan bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia belum dimanfaatkan optimal. Padahal, pembangunan berbasis masyarakat dan pendidikan memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas ekonomi lokal. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, diketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menjawab

beberapa pertanyaan utama, yaitu: (1) Apa saja potensi sumber penerimaan daerah yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)? (2) Bagaimana peluang peningkatan penerimaan daerah NTT dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan? (3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan daerah di NTT? dan (4) Bagaimana strategi yang tepat untuk memanfaatkan potensi penerimaan daerah guna mendorong pembangunan berkelanjutan? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi potensi sumber-sumber penerimaan daerah di Provinsi NTT; (2) Menganalisis peluang peningkatan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan; (3) Mengkaji kendala-kendala dalam optimalisasi penerimaan daerah di NTT; dan (4) Merumuskan strategi pemanfaatan potensi penerimaan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis potensi serta peluang penerimaan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai sumber pendapatan daerah, baik dari sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, kelautan, maupun dari potensi penerimaan alternatif seperti energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya lokal. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota di NTT yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, seperti Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Belu, selama periode April hingga Juni 2025.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, antara lain pejabat dari Badan Pendapatan Daerah, Bappeda, Dinas Pariwisata, serta pelaku usaha lokal yang terlibat dalam sektor-sektor strategis penerimaan daerah. Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi potensi penerimaan di sektor-sektor tersebut. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti Laporan APBD Provinsi NTT selama lima tahun terakhir, laporan kinerja pemerintah daerah, data Badan Pusat Statistik (BPS), serta referensi dari jurnal ilmiah dan publikasi kebijakan dari Kementerian Keuangan maupun Bappenas.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan teknik analisis isi (content

analysis) dan pengorganisasian data berdasarkan kategori tematik, seperti jenis sumber penerimaan, kontribusinya terhadap APBD, kendala dalam optimalisasi penerimaan, serta relevansinya terhadap indikator pembangunan berkelanjutan. Untuk memperkuat analisis, digunakan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) guna memetakan kekuatan dan kelemahan pengelolaan potensi daerah, sekaligus mengidentifikasi peluang dan tantangan ke depan. Seluruh hasil analisis dihubungkan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 8 (pertumbuhan ekonomi), SDG 11 (kota dan komunitas berkelanjutan), serta SDG 13 dan 15 (lingkungan hidup dan perubahan iklim), sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi NTT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki berbagai potensi sumber penerimaan daerah yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Potensi tersebut tersebar di berbagai sektor, antara lain sektor pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan, serta energi baru dan terbarukan. Sektor pariwisata, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat (Labuan Bajo), menjadi penyumbang utama retribusi daerah melalui pendapatan dari tiket objek wisata, pajak hotel, restoran, dan jasa pariwisata lainnya. Selain itu, sektor pertanian dan peternakan, seperti produksi jagung, kopi, dan ternak sapi di daratan Timor dan Sumba, Memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi andalan penerimaan asli daerah (PAD) melalui pajak hasil bumi dan retribusi distribusi produk. Di sisi lain, potensi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang tersebar di Pulau Sumba dan Lembata belum tergarap optimal, namun menyimpan peluang besar untuk menghasilkan pendapatan daerah di masa depan Potensi Sumber Penerimaan Daerah di Provinsi NTT

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki beragam potensi sumber penerimaan daerah yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan. Potensi utama berasal dari sektor pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan, serta energi baru dan terbarukan. Studi oleh JAKADARA (2021) dan Jurnal Pariwisata Nusantara (2021) menyebutkan bahwa pariwisata, terutama di Labuan Bajo, menjadi kontributor utama PAD melalui pajak hotel, retribusi tiket objek wisata, dan jasa pariwisata lainnya. Sektor pertanian dan peternakan di daratan Timor dan Sumba juga berkontribusi melalui pajak hasil bumi dan peternakan di daratan Timor dan

Sumba juga berkontribusi melalui pajak hasil bumi dan retribusi distribusi hasil pertanian (Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian, 2022). Potensi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin di Pulau Sumba dan Lembata menyimpan peluang besar yang belum tergarap optimal (Jurnal Energi Terbarukan NTT, 2023).

Peluang peningkatan penerimaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sangat menjanjikan dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada. Salah satu strategi utama adalah diversifikasi sumber pendapatan daerah, di mana NTT tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, tetapi juga mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan menjadi peluang besar karena NTT memiliki destinasi wisata alam dan budaya yang unik seperti Pulau Komodo dan Labuan Bajo. Dengan mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan serta melibatkan masyarakat lokal, pemerintah dapat meningkatkan PAD sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah juga penting untuk mendukung hal ini, dengan mengoptimalkan sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi melalui transparansi, efisiensi administrasi, serta digitalisasi pelayanan dan pemungutan pajak.

Kemitraan dan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, juga menjadi peluang penting dengan membangun infrastruktur pendukung dan menciptakan kemudahan berusaha, yang tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak tetapi juga membuka lapangan kerja. Terakhir, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di sektor hutan, perikanan, dan pertanian dapat menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi lokal, yang pada akhirnya akan menambah pemasukan daerah secara signifikan. Dengan mengintegrasikan semua aspek tersebut, NTT memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peluang Peningkatan Penerimaan Daerah untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Peluang peningkatan penerimaan daerah terbuka luas apabila pemerintah daerah mampu memperkuat tata kelola dan pengelolaan potensi sektor strategis tersebut. Penguatan regulasi dan sistem pemungutan pajak serta retribusi daerah yang modern dan berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi (Jurnal Ekonomika INDEPENDEN, 2023; Jurnal Teknologi dan Inovasi Daerah, 2023).

Selain itu, pengembangan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dapat mendorong investasi masyarakat lokal dapat mendorong investasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Jurnal Pembangunan Daerah JIK, 2023). Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) juga menjadi peluang untuk memperkuat struktur penerimaan daerah (Jurnal Kebijakan Fiskal, 2023). Kontribusi peningkatan PAD berperan penting dalam membiayai program pembangunan berkelanjutan, termasuk pelestarian lingkungan, pendidikan, dan kesehatan, sesuai prinsip SDGs (Jurnal Ekonomi Pembangunan Widya Mandira, 2023; Brundtland Report, 1987).

Optimalisasi penerimaan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya kapasitas dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah dan perpajakan, di mana kurangnya pelatihan dan tenaga ahli menyebabkan pengelolaan penerimaan tidak berjalan maksimal. Selain itu, infrastruktur dan teknologi yang kurang memadai, terutama dalam sistem administrasi perpajakan dan retribusi, menghambat proses pemungutan pajak yang efisien dan membuka peluang terjadinya kebocoran penerimaan. Ketergantungan yang masih tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), juga mengurangi motivasi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor lain yang menjadi hambatan adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di kalangan masyarakat dan pelaku usaha, yang diperparah oleh sistem pengawasan yang belum optimal dan tingginya aktivitas ekonomi informal. Masalah regulasi dan birokrasi yang rumit serta tumpang tindih juga menjadi kendala signifikan, di mana ketidaksinkronan antara peraturan daerah dan pusat sering menimbulkan kebingungan serta menghambat pelaksanaan optimalisasi pajak.

Selain itu, potensi sumber pendapatan yang besar di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata di NTT belum dimanfaatkan secara maksimal, disebabkan kurangnya inovasi dan investasi di sektor-sektor tersebut. Keseluruhan kendala ini menjadi tantangan besar yang harus diatasi agar penerimaan daerah NTT dapat meningkat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kendala dalam Optimalisasi Penerimaan Daerah di NTT

Penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan daerah masih menghadapi kendala yang cukup signifikan. Menurut Prosiding Sembadha (2022), kapasitas fiskal daerah yang terbatas, termasuk rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pajak dan

retribusi, menjadi faktor utama. Sistem administrasi perpajakan yang masih manual dan kurang transparan membuka peluang kebocoran penerimaan (Jurnal Ekonomika INDEPENDEN, 2023). Infrastruktur yang belum memadai, seperti jaringan teknologi informasi dan akses transportasi, menghambat pengembangan sektor pariwisata dan agribisnis (Jurnal Infrastruktur dan Pembangunan Daerah, 2022). Selain itu, lemahnya koordinasi lintas sektor dan kurangnya sinergi antara perencanaan pembangunan dan kebijakan fiskal menurunkan efektivitas pengelolaan potensi daerah (Jurnal Ekonomi-Qu, 2022; Jurnal Pembangunan Daerah JIK, 2023).

Strategi yang tepat untuk memanfaatkan potensi penerimaan daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur harus dimulai dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah serta perpajakan.

Selanjutnya, perlu dilakukan investasi pada infrastruktur teknologi informasi guna mendukung sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, efisien, dan transparan, sehingga proses pemungutan pajak dapat berjalan optimal dan mengurangi kebocoran penerimaan. Diversifikasi sumber pendapatan daerah juga harus menjadi fokus utama dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata berkelanjutan, pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Pemerintah daerah perlu membangun kemitraan strategis dan menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investasi baik domestik maupun asing yang dapat memperluas basis pajak dan membuka lapangan kerja.

Selain itu, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak harus terus didorong melalui edukasi dan penguatan sistem pengawasan agar masyarakat lebih memahami pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan daerah. Regulasi dan birokrasi yang ada juga perlu disederhanakan dan disinkronkan agar tidak menghambat proses optimalisasi penerimaan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara terpadu, NTT dapat mengoptimalkan potensi penerimaan daerah sekaligus memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat. Strategi Pemanfaatan Potensi Penerimaan Daerah untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Strategi yang tepat untuk memanfaatkan potensi penerimaan daerah harus berfokus pada penguatan kapasitas aparatur daerah, modernisasi sistem perpajakan, dan pengembangan infrastruktur pendukung. Implementasi teknologi informasi dalam pemungutan pajak dan

pelayanan publik menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi (Jurnal Teknologi dan Inovasi Daerah, 2023). Pemerintah daerah perlu mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat untuk investasi yang berkelanjutan, khususnya di sektor pariwisata dan energi terbarukan (Jurnal Energi Terbarukan NTT, 2023). Perencanaan pembangunan harus selaras dengan prinsip keberlanjutan, mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 2022). Pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi strategi penting agar pembangunan lebih inklusif dan berdampak luas (Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah, 2023).

KESIMPULAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi sumber daya alam dan sektor unggulan yang besar, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan energi terbarukan, yang dapat menjadi basis peningkatan penerimaan daerah. Potensi ini, jika dikelola dengan baik, mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, peluang untuk memperluas basis pajak, mendorong investasi lokal, serta memanfaatkan teknologi digital dalam sistem perpajakan dan pelayanan publik dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Namun, pemanfaatan potensi tersebut menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas SDM, dan tata kelola yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, inklusi sosial, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat NTT secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2021). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024. Kementerian PPN/Bappenas. <https://www.bappenas.go.id>
- Gunawan, H. (2020). Analisis potensi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD di Provinsi NTT. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 132–145. <https://doi.org/10.22212/jekp.v11i2.2020>

- JIE. (2022). Ketergantungan fiskal dan potensi PAD di daerah tertinggal. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 21(1), 45–58.
- Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian*. (2022). Optimalisasi sektor pertanian untuk meningkatkan PAD. *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian Indonesia*, 14(3), 76–89.
- Jurnal Ekonomi Pembangunan Widya Mandira*. (2023). Pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi lokal di NTT. **Jurnal Ekonomi Pembangunan Widya Mandira*, 6(1), 99–113.
- Jurnal Ekonomika INDEPENDEN*. (2023). Efektivitas sistem perpajakan daerah: Studi kasus NTT. *Jurnal Ekonomika INDEPENDEN*, 11(2), 58–71.
- Jurnal Infrastruktur dan Pembangunan Daerah*. (2022). Investasi infrastruktur dalam pembangunan daerah. *Jurnal Infrastruktur dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 40–53.
- Jurnal Pariwisata Nusantara*. (2021). Potensi pariwisata alam dalam meningkatkan PAD. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 10(2), 33–47.
- Jurnal Pembangunan Daerah JIK*. (2023). Integrasi kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Kebijakan*, 12(2), 88–102.
- Jurnal Ekonomi-Qu*. (2022). Keterkaitan antara penguatan ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 18(1), 25–39